

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance*. Dalam upaya penerapan *good governance* yang baik, maka haruslah diimbangi dengan *good government* pula. Maksudnya disini, tidak hanya tata kelola pemerintahan saja yang harus ditekankan. Namun, pemerintah juga harus berlaku yang baik sebagai pelaku pengelolaan keuangan rakyat. Agar pemerintahan berjalan dengan baik, berdaya guna dan juga berhasil guna. Maka penerapan prinsip-prinsip dari *good governance* tersebut sangatlah penting dan juga harus diimbangi dengan *good government governance* yang baik pula. Dengan terselenggaranya pemerintahan yang berasaskan *good governance* guna meningkatkan akuntabilitas publik pada akhirnya. Dengan meningkatnya akuntabilitas publik maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang ada dan dapat dilakukan suatu kontrol jika terjadi penyimpangan (Abdul Halim, 2007).

Idirwan dalam (Halim dan Damayanti, 2007:81) menyatakan bahwa dengan adanya otonomi daerah pendayagunaan aparatur merupakan suatu tuntutan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan dengan

mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. *Good governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu. Suatu penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan *good governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip *good governance* itu sendiri diantaranya partisipasi, pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan (Mardiasmo, 2009).

Untuk memperoleh hasil capaian yang baik aparaturnya harus bisa menunjukkan hasil kinerja yang baik dalam penerapan *good government governance* yang baik, namun dilihat dalam tajuk berita setelah melakukan inspeksi Mendagri menemukan bahwa 58% dari 60.000 camat tidak memahami penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*).

(Sumber : [www.merdeka.com.co.id](http://www.merdeka.com.co.id) di posting pada 29 Desember 2015 diakses pada 21 Januari 2016 Pukul 12.44 WIB)

Pemerintahan yang baik serta *clean government* yang baik tidak akan terwujud dari penerapan akuntabilitas sehingga pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang serta kemampuan daya saing aparaturnya sendiri tanpa melakukan tindakan seperti menyuap atau yang sering adalah korupsi oleh jajaran pemerintahan namun dilihat pada tajuk berita tentang “Hilangkan Budaya Nyetor ke Atasan” dimana ketua KPK Agus mengatakan birokrasi yang bersih akan mempercepat kemajuan bangsa. Begitu pula sebaliknya, birokrasi yang korup, kata dia, akan menghambat

Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan. Agus mengatakan, korupsi di tubuh birokrasi masih parah. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah kasus yang ditangani KPK saat ini yang memperkarakan 17 orang gubernur, 49 orang wali kota dan bupati, 101 orang anggota legislatif serta 123 orang aparatur sipil negara dimana kasus tersebut belum termasuk yang ditangani jaksa dan polisi.

(Sumber : [www.kompas.com](http://www.kompas.com) diposting pada tanggal 1 Maret 2015 diakses pada Kamis 10 Maret 2016 pukul 11.20 WIB)

Adapun permasalahan tentang penyelewengan dalam *clean government* terkait dengan anggaran pemerintah dalam tajuk berita "ICW: Sepanjang Tahun 2015, Anggaran Negara 134 Kali Dikorupsi". Berdasarkan pemantauan Indonesia *Corruption Watch* (ICW), terdapat sejumlah 550 kasus korupsi sepanjang 2015 yang ditangani oleh aparat penegak hukum masuk ke tahap penyidikan. Dari jumlah tersebut, 308 kasus masuk tahap penyidikan pada semester pertama di 2015 dan 242 kasus pada semester kedua. Adapun dari jumlah kasus tersebut, modus yang paling banyak digunakan adalah penyalahgunaan anggaran dengan jumlah 134 kasus. Sementara kerugian negaranya mencapai Rp 803,3 miliar. "Modus yang paling sering digunakan pada 2015 adalah penyalahgunaan anggaran sekitar 24 persen atau 134 kasus," ujar Staf Divisi Investigasi ICW, Wana Alamsyah di Hotel Akmani.

(Sumber : [www.kompas.com](http://www.kompas.com) diposting pada tanggal 24 Februari 2016 diakses pada Kamis 10 Maret 2016 pukul 11.50 WIB).

Selain itu terdapat masalah tentang pelayanan publik dengan tajuk “Atasi Praktik Curang di SKPD Kota Bandung”. Pemerintah Kota Bandung bergerak cepat merespons temuan Ombudsman terkait dugaan praktik curang di lingkungan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, akan melakukan reformasi di tiga SKPD yang disinyalir terdapat praktik curang tersebut. Ketiga SKPD tersebut yakni Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud). Ombudsman merilis banyaknya praktik maladministrasi di tiga dinas tersebut. Dilaporkan bahwa terdapat 22 rekaman video yang menunjukkan bagaimana pegawai di dinas-dinas tersebut melakukan praktik kecurangan administrasi.

(Sumber : [www.jurnalbandung.com](http://www.jurnalbandung.com) diakses pada Rabu 6 April 2016 pukul 09.32 WIB).

Selanjutnya penjelasan terkait kasus diatas akan dijelaskan pada tabel berikut :

Selanjutnya dengan diterapkannya PP No. 60 tahun 2008 disertai dengan Keppres No. 74 tahun 2001, pemerintah daerah yang otonom diharap mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” oleh BPK. Tetapi dalam prakteknya untuk mendapatkan opini WTP dari BPK sangatlah sulit. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang ada dalam pemerintahan tidak memberikan kinerja maksimal bagi satuan kerjanya. Terbukti dalam Dari rekapitulasi 26 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat yang telah diserahkan LHP atas LKPD tahun anggaran 2014 hingga Senin (1/6/2015) Kota Bandung mendapatkan opini audit dari BPK “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”

(Sumber : [www.bandung.bpk.go.id](http://www.bandung.bpk.go.id) diakses pada Kamis 20 Januari 2016 pukul 13.46).

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi (Bastian, 2006:329). Dalam mewujudkan kinerja aparatur yang memuaskan berupa tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/Daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi Negara secara menyeluruh (Sutopo dalam LAN, 2002)

Keberhasilan sebuah organisasi pemerintahan selain diukur dengan perspektif kinerja dapat diukur juga dengan melihat perspektif pengelolaan keuangannya. Dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang tepat dapat memberikan kepastian mengenai keberhasilan atau ketetapan suatu kegiatan.. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan Negara/Daerah (Abdul Rohman, 2009).

Untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga Negara, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan (PP 60 Tahun 2008). Pemerintah daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk mencapai

pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Sumber : [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) diakses pada Sabtu 23 Januari 2016, pukul 14.24). Selain itu untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan pengelolaan organisasi yang profesional sehingga mampu menciptakan suatu organisasi publik yang berorientasi pada *value for money* ( *effectivity, efficiency, economy* ) (Mardiasmo,2009).

*Value for money* akan terwujud jika di dukung adanya komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-komponen individual dalam menjalankan operasional organisasi . komitmen tersebut dapat terwujud apabila individu dalam organisasi, menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi (Robbins,2008).

Komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Sehingga dalam komitmen organisasi tercakup unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi (Robbins,2008).

Faktor yang tidak kalah penting dalam tata kelola pemerintahan selain kinerja aparatur , pengelolaan keuangan daerah dan komitmen organisasi adalah budaya organisasi. Menurut Nawawi (2008) yang dikutip dari Cushway B dan Lodge D, mengemukakan bahwa budaya organisasi adalah suatu kepercayaan dan nilai-nilai yang menjadi filsafah utama yang dipegang teguh oleh anggota

organisasi dalam menjalankan atau mengoperasionalkan kegiatan organisasi. Sehingga dalam budaya organisasi pada pemerintahan daerah adalah sistem nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota pemerintah daerah dan yang dipelajari, diterapkan, serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat, dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam suatu pemerintah daerah untuk mencapai *good governance*.

Budaya organisasi yang baik tentunya akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang baik pula. Kualitas pelayanan sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh banyak aspek salah satunya adalah budaya organisasi dan cara pengorganisasiannya. Dalam organisasi tentunya banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mencapai tujuannya, sedangkan jalannya organisasi dipengaruhi oleh perilaku banyak individu yang memiliki kepentingan masing-masing. Oleh sebab itu, budaya organisasi sangat penting, karena merupakan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam organisasi. Kebiasaan tersebut mengatur tentang norma-norma perilaku yang harus diikuti oleh para anggota organisasi, sehingga menghasilkan budaya yang produktif. Budaya yang produktif adalah budaya yang dapat menjadikan organisasi menjadi kuat dan tujuan perusahaan dapat tercapai (Tjiptono, 2004).

Jadi, dapat dijelaskan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi dan budaya serta fenomena yang terjadi di Kota Bandung, jika saling bersinergi dan melaksanakan peranannya masing-masing maka akan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penelitian yang berkaitan dengan *good government governance* memang telah banyak diangkat. Namun, penelitian mengenai kinerja aparatur daerah, pengelolaan keuangan, komitmen organisasi dan budaya organisasi masih terbatas. Karena penelitian yang diangkat lebih mengarah pada sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dikemukakan di atas serta dari penelitian sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul **“PENGARUH KINERJA APARATUR, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KOMITMEN ORGANISASI, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE*.”**

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

1. Bagaimana kinerja aparatur, pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi dan budaya organisasi yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung.
2. Bagaimana pelaksanaan *good government governance* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh kinerja aparatur, pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap *good government governance* secara parsial.



4. Seberapa besar pengaruh kinerja aparatur, pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap *good government governance* secara simultan.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja aparatur, pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi dan budaya organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui menganalisis *good government governance* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja aparatur, pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap *good government governance* secara parsial.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja aparatur, pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap *good government governance* secara simultan.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan dan manfaat diantaranya :

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini merupakan latihan teknis untuk memperluas serta membandingkan antara teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat melengkapi khasanah teori yang telah ada dalam meningkatkan kualitas implementasi sistem informasi akuntansi dan sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis/ Empiris**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti yang dijabarkan, antara lain:

#### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh kinerja aparatur, pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi, budaya organisasi, dan dampaknya terhadap *good government governance* serta sarana bagi peneliti untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti selama di bangku kuliah.

## 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berharga dan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi mengenai kinerja aparatur, pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi, budaya organisasi dengan *good government governance*

## 3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi penelitian berikutnya yang tertarik untuk meneliti kajian yang sama di waktu yang akan datang.